

ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SUMATERA UTARA

¹Anggreini Dwi Agvita Berutu*, ²Riska Oktaini, ³Silvia Sugengni, ⁴Maya Panorama

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang

Email: anggreiniberutu@gmail.com

ABSTRAK

Kesenjangan infrastruktur antar daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan disparitas ekonomi antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumatera Utara. Kajian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Sumatera Utara, banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah yang pada gilirannya telah membawa banyak manfaat yaitu meningkatnya produktivitas dan daya saing dalam bidang ketahanan pangan nasional dan pariwisata. Tentunya infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir juga berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang juga mengalami peningkatan.

Kata kunci: Pembangunan, Infrastruktur, Masyarakat Pesisir, Sumatera Utara

ABSTRACT

The disparity in infrastructure among regions is regarded as one of the factors causing economic disparities between regions. This research aims to analyse the impact of infrastructure development on the economic development of North Sumatra's coastal communities. This study employs a descriptive qualitative research design. The data is gathered through a literature review. According to the study's findings, the government has constructed a significant amount of infrastructure in North Sumatra, which has resulted in numerous benefits, including increased productivity and competitiveness in the fields of national food security and tourism. Of course, adequate infrastructure in coastal areas affected the surrounding community's economic productivity, which has also increased.

Keywords: Development, Infrastructure, Coastal Communities, North Sumatra

PENDAHULUAN

Sesuai letak geografis, Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 bagian wilayah, diantaranya: wilayah Pantai Barat, wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan, dan wilayah Pantai Timur. (Ramadhani & Setiawan, 2019) Tahun 2019 Realisasi Pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,08 triliun Rupiah, ini menunjukkan terjadi peningkatan sekitar 2,99% dibandingkan dengan tahun anggaran 2018. Sebagian besar anggaran ini ini berasal dari dana perimbangan sebesar 7,30 triliun dan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 5,76 triliun. Sebagian besar dana perimbangan 5,76% berasal dari dana alokasi khusus

sedangkan selebihnya diperoleh dari dana alokasi umum, bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak. (BPS Provinsi Sumatera, 2020).

Menurut (Ekosafitri et al., 2017) Tingkat akses terhadap infrastruktur mempunyai hubungan yang erat ke belakang daripada hubungan ke depan, berimplikasi bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan sektor hulu daripada sektor hilir. Hal ini menyiratkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Didukung dengan penelitian (Alamasiyah, 2021) bahwa mobilitas masyarakat dapat ditingkatkan dengan perbaikan infrastruktur.

Namun demikian, kesenjangan infrastruktur antar daerah dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan disparitas ekonomi antar wilayah. Artinya bahwa topik ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks Indonesia, apalagi saat ini pemerintah kian bersemangat dalam melancarkan pengembangan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. (Sukwika, 2018) Melihat urgensi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumatera Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Infrastruktur Pesisir

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang berasal dari berbagai pekerjaan utama yang secara historis didukung oleh sektor publik untuk meningkatkan output sektor swasta dan memungkinkan pengeluaran rumah tangga. Infrastruktur bukan sekadar terbatas dalam perspektif ekonomi tetapi berkaitan juga dengan bidang pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. (Bakri & Prihartanto, 2020).

Wilayah pesisir merupakan fokus penting pembangunan karena berpenduduk padat dan rentan terhadap berbagai bahaya. Aspek kritis pengurangan risiko bencana (PRB) adalah berfungsinya sistem peringatan dini multi-bahaya (MHEWS) secara efisien yang aspek penting risiko bencana dimiliki oleh Negara tetapi memerlukan kerjasama internasional dan multilateral tingkat tinggi. Mereka dirancang sesuai dengan standar operasional yang terdefinisi dengan baik yang harus diterapkan secara seragam di berbagai kegiatan dan proyek. (Haigh et al., 2018)

Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan mengandalkan sumber daya laut dan pesisir untuk menopang kehidupan ekonominya. Masyarakat pesisir tidak hanya nelayan, tetapi juga pengolah dan pedagang ikan, dan kemiskinan mereka diklasifikasikan sebagai kemiskinan struktural, kemiskinan budaya, dan kemiskinan ekonomi. (AS, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature.

PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir

Secara umum, infrastruktur didefinisikan sebagai komoditas fisik yang terkait dengan fasilitas sipil dan perkotaan, seperti jalanan, drainase, jaringan air minum, dan instalasi listrik. Konsep infrastruktur, bagaimanapun, tidak berakhir di situ; prosedur operasi dan program pembangunan juga berfokus pada jenis infrastruktur. Infrastruktur jalan merupakan jenis infrastruktur yang menghubungkan dua titik. (Balapadang et al., 2019).

Wilayah pesisir memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi karena faktor-faktor berikut: 1) sumber daya terbarukan (hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, serta sumber daya perikanan laut); 2) aset tak terbarukan (sumber daya mineral dan geologi); jasa lingkungan (kawasan lindung dan sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi, dan sumber energi. Proses perencanaan pesisir dan kawasan pesisir

merupakan faktor penting untuk keberhasilan perhatian yang serius agar kawasan pesisir tidak rusak, seperti yang disebabkan oleh pembukaan lahan intensif untuk budidaya udang di tambak dengan mengosongkan hutan bakau, seperti di pantai utara Jawa. (Ekosafitri et al., 2017).

Panjang jalan di Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai 40.256,31 km. Berdasarkan kewenangan pemeliharaan jalan dibagi menjadi 4.444 jalan nasional sepanjang 2.632,22 km, jalan provinsi 3.005,65 km dan jalan kabupaten/kota 34.618,44 km. (BPS Provinsi Sumatera, 2020) Kondisi jalan di Sumatera Utara masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Khusus untuk jalan Provinsi, kondisi rusak, rusak berat dan tidak terperinci ada sepanjang 530,25 km atau 17,64 persen dari total panjang jalan Provinsi di Sumatera Utara.

Dalam rangka membangun infrastruktur di wilayah pesisir, pemerintah perlu menyusun strategi adaptasi untuk menghadapi kenaikan muka air laut (sea level rise/SLR). Menurut (Woodruff et al., 2018) strategi adaptasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah adaptasi (misalnya, beach nourishment). Artinya bahwa perlu proses menambahkan sedimen ke pantai atau daerah dekat pantai. Pantai yang lebih luas dan lebih tinggi dapat melindungi struktur pantai dari badai, menciptakan habitat baru, dan meningkatkan peluang rekreasi.

Pembangunan Infrastruktur dalam Meningkatkan Ekonomi bagi para Masyarakat Pesisir

Dalam riset yang dilakukan oleh (Latuni, 2019) Infrastruktur merupakan fasilitas riil yang mendapatkan perhatian untuk dikembangkan atau dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintahan dalam pemasokan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan serupa untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Dengan demikian infrastruktur adalah konsep fisik yang diperlukan guna mencukupi kebutuhan primer masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Secara umum, infrastruktur dapat dikatakan meliputi fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pelayan masyarakat dalam mengatasi pengaruh mekanisme pasar yang tidak berfungsi serta untuk mendukung dan mendorong kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. sebuah komunitas.

Sementara itu, (Ekosafitri et al., 2017) dalam arielnya yang bertemakan “Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara”, menunjukkan hasil Rencana pengembangan wilayah pesisir dilaksanakan dengan menetapkan prioritas wilayah dan menumbuhkembangkan wilayah potensial sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, seperti tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana wilayah. Rencana pembangunan pesisir harus melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan masalah lingkungan pesisir dan penipisan sumber daya alam untuk memprioritaskan pembangunan pesisir sebagai dasar arah pembangunan.

Begitu juga di Sumatera Utara, banyak infrastruktur yang telah didirikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR) di wilayah Sumatera Utara. Percepatan perluasan infrastruktur terus digalakkan sebagai bagian program prioritas pemerintah untuk mendorong produktivitas dan persaingan ekonomi negara. Misalnya, food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sedang

dikembangkan untuk menambah kekuatan ketahanan pangan nasional. Terdapat 3 tempat penyimpanan pangan dengan luas total 785 hektar. Yakni, desa Hutajulu dengan luas 120,5 hektar, desa Ria ria dengan luas 411,5 hektar, dan desa Parsingguran dengan luas 253 hektar. Dalam rangka pemberian bantuan, perluasan infrastruktur akan senantiasa dibiayai, berawal dari pembangunan jaringan pipa irigasi seluas 1.000 hektar sampai akses jalan menuju area lumbung pangan. (Bahfein, 2021)



Gambar 1. Food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan
Sumber: (Kemenkomarves, 2021)

Di bidang pariwisata, Kementerian PUPR terus melengkapi infrastruktur pendukung Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. Untuk mendukung koneksi dengan DPSP Danau Toba, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Aek Ponggol yang dijadwalkan selesai pada 2022. Saat ini jembatan alternatif Tano pongol memiliki panjang 294 meter dan memiliki akses darat menuju Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Kementerian PUPR juga telah memperluas Terusan Tanopongol di Danau Toba. Perluasan terusan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan wisatawan menjelajahi Pulau Samosir dengan kapal pesiar besar. Selain itu, Kementerian

PUPR juga telah menetapkan Desa Uros Futa Raja di Desa Lumbang Shishhi Truan Provinsi Samosir. Di Desa Huta Raja, terdapat sekitar 50 alat tenun ulos yang masih menggunakan alat tenun tradisional Gedogan (alat tenun lembaran). Selain menjadi sentra tenun Ulos, juga terdapat rumpun tradisional Batak samosir dan Gorga. (PUPR, 2021).

Terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (AS, 2019) bahwa permasalahan utama pengembangan coastal community adalah Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan ekonomi adalah konstan. Selain itu, mereka masih memiliki akses terbatas pada teknologi dan modal pasar, yang berdampak pada dinamika perusahaan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, dengan melemahnya informasi untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang buruk akibat terbatasnya akses pendidikan kesehatan dan pelayanan publik. Kemudian terjadi degradasi sumber daya lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta lemahnya kebijakan kelautan sebagai salah satu prinsip utama pembangunan nasional. (AS, 2019)

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur menurut kajian (Bakri & Prihartanto, 2020) diumpamakan sebagai input yang mampu mempengaruhi output agregat dan dapat menjadi sumber peningkatan batas kemajuan teknologi. Hal ini dikarenakan munculnya eksternalitas dalam pembangunan infrastruktur. Eksternalitas infrastruktur berdampak pada kegiatan produksi karena memberikan aksesibilitas, kenyamanan, dan kemungkinan kegiatan produksi yang lebih efektif. Ini disebut sebagai eksternalitas positif. Akibatnya, kesulitan eksternalitas positif yang dimasukkan ke dalam fungsi produksi melalui infrastruktur menjadi lebih

sederhana. Pasar tanah bereaksi ketika infrastruktur baru dipasang, terutama infrastruktur transportasi baru yang mengubah pola aksesibilitas di dalam kota. Namun, di mana pembangunan kembali dan bukan pembangunan baru dilakukan, peningkatan nilai tanah sering kali diperoleh secara langsung kepada pemilik properti yang ada yang mendapat manfaat dari investasi infrastruktur baru. Selain dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan pendapatan agregat, bidang penelitian lain baru-baru ini berfokus pada dampak pada ketimpangan pendapatan.

Didukung penelitian yang dilakukan oleh (Alamasiyah, 2021) dengan lokasi penelitian di pesisir pantai Kenjeran Surabaya, bahwa melihat kondisi infrastruktur di Kenjeran akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang pesat. Tentunya berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat sekitar, khususnya UMKM. Sentra Ikan Bulak (SIB) adalah nama UMKM yang dibangun pemerintah untuk membantu para pelaku. SIB dibuat dengan maksud agar pemilik usaha UMKM dapat menata stand-nya dengan rapih dan berurutan, sehingga para pemilik usaha dapat merasa nyaman ketika berjualan begitu juga konsumen (wisatawan) akan mampu membeli dengan mudah karena keterjangkauan pedagang yang strategis.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil kajian pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Wilayah pesisir memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi. Namun dalam rangka membangun infrastruktur di wilayah pesisir, pemerintah perlu menyusun strategi adaptasi untuk menghadapi kenaikan muka air laut (sea level

rise/SLR). Di Sumatera Utara, banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah yang pada gilirannya telah membawa banyak manfaat yaitu meningkatnya produktivitas dan daya saing dalam bidang ketahanan pangan nasional dan pariwisata. Tentunya infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir juga berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang juga mengalami peningkatan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamasiyah, C. L. (2021). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Di Wilayah Kenjeran Surabaya.
- AS, Z. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabu*, 1(2), 84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Bahfein, S. (2021). Ini Deretan Infrastruktur yang Dibangun Pemerintah di Sumatera Utara. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/12/170000321/ini-deretan-infrastruktur-yang-dibangun-pemerintah-di-sumatera-utara?page=all>
- Bakri, M. D., & Prihartanto, E. (2020). Analysis of the influence of ring road infrastructure development on economic growth in the coastal area of Tarakan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 599(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012089>
- Balapadang, D., Susanto, A., Puro, S., & Jauhari, A. (2019). PESISIR Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. 41–46.
- BPS Provinsi Sumatera. (2020). Statistik Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157>
- Haigh, R., Amaratunga, D., & Hemachandra, K. (2018). A capacity analysis framework for multi-hazard early warning in coastal communities. *Procedia Engineering*, 212(2017), 1139–1146. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.147>
- Kemenkomarves. (2021). Panen Perdana di Food Estate Humbang Hasundutan, Menko Luhut: Hasilnya Sangat Baik. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. <https://maritim.go.id/panen-perdana-food-estate-humbang-hasundutan-menko-luhut/>
- Latuni, F. (2019). Development of Road and Bridge Infrastructure to Enhance Economic Growth in the Coastal Communities of Tuminting District in Manado City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 780. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1143>
- PUPR. (2021). Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur Pendukung Produktivitas Perekonomian di Sumatera Utara. Kementerian PUPR. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-bangun-sejumlah-infrastruktur-pendukung-produktivitas-perekonomian-di-sumatera-utara>
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Woodruff, S., BenDor, T. K., & Strong, A. L. (2018). Fighting the inevitable: infrastructure investment and coastal community adaptation to sea level rise. *System Dynamics Review*, 34(1–2), 48–77. <https://doi.org/10.1002/sdr.1597>